

PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT - PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT/SKP/STP *)
PBB tahun pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP : NPWPD
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.
Kampung/Kelurahan *) : Kecamatan
Kota/Kabupaten :
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB atas objek pajak yang terletak di :
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.
Kampung /Kelurahan *) : Kecamatan
Kabupaten :
No.SPPT/NOP(lama) :

Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

- Beri tanda X pada kolom yang dipilih
- 1. Kesalahan tulis : nama wajib pajak (bukan ganti/balik nama)/alamat wajib pajak/ alamat objek pajak/ No. SPPT/SKPD/SPTPD tahun pajak/tanggal jatuh tempo *) Data yang benar adalah
 - 2. SPPT/SKPD/SPTPD *) untuk objek pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu dengan NOP yang berbeda (pengenaan ganda). Diterima agar NOP.....dihapus.
 - 3. Kesalahan hitung : Penambahan/Pengurangan/Perkalian/Pembagian *)
 - 4. Salah/keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan terhadap fakta/kenyataan objek/subjek pajak yang sudah jelas benar : SPPT yang terbit atas objek pajak yang seharusnya bebas PBB (tanah wakaf, kuburan, tempat ibadah, kantor pemerintah dll)/salah penerapan NJKP/salah penerapan sektor (objek PBB Sektor Perdesaan/Perkotaan dikenakan PBB Sektor Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan atau sebaliknya *)
 - 5.

Bersama ini dilampirkan pula :

- Beri tanda X pada kolom yang dipilih
- 1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
 - 2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.
 - 3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
 - 4. Asli SPPT/SKP/STP *) tahun pajak yang berkenaan.
 - 5. Foto copy bukti pembayaran PBB (SSPD/STTS *) tahun terakhir.
 - 6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari kepala Desa atau Lurah mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

()

*) Coret yang tidak perlu